

**DINAMIKA UMAT ISLAM INDONESIA PADA  
MASA KOLONIAL BELANDA (Tinjauan Historis)***Oleh:***Sitti Aisyah***Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis**UIN Alauddin Makassar***Abstract**

This paper explains about dynamics of Moslem's life in Indonesia on the era of the Dutch Colonialism. In history, before European came to Indonesia, Islam had increased in Indonesia and had become majority religion since 13<sup>th</sup> century in Sumatera island. There, established an Islamic Kingdom, namely Samudra Pasai, and then transformed to Aceh Darussalam kingdom, furthermore, in the early of 15<sup>th</sup> century, Islam had dominated the region of Malaka (as a center of Southeast Asia trade).

When Islam had come in Indonesia, spreading of Islam started by Islamic Scholars with huge motivation. Beside spreading Islam, they were trading also. The important role of scholar could be tracked on the Islamization map which is directly similar with economic development and the establishment of Islamic kingdoms. In several region had become the center of trading. International Moslems whom became to important exponent and made communities on the beach area. Through this community, Islam had introduced to the society.

However since The Dutchman came to Indonesia, trade situation had changed. The Dutch colonized Indonesia, even the spreading of Islam had stopped, because the scholars focus on struggle against the Dutch penetration.

*Keywords: Moslems, Indonesia, Colonialism, The Dutch*

**A. Kondisi Umat Islam Masa Kolonialisme**

Pada akhir abad 16, Belanda mulai melakukan survei dan pemetaan wilayah Nusantara akibat ditutupnya pelabuhan di daerah jajahan Portugis di Semenanjung Malaka bagi orang Belanda. Survei itu dilakukan dalam upaya mulai mencari jalur pelayaran sendiri ke daerah rempah-rempah di Timur Jauh. Penutupan itu terkait dengan penyatuan Spanyol dan Portugis, setelah Raja Philip dari Spanyol naik takhta pada tahun 1580. Survei dan pemetaan di kawasan Nusantara ini, dilakukan oleh Claudius Ptolomeus, kemudian dilanjutkan oleh Jan Huygen van Linscoten.<sup>1</sup>

Dalam ekspedisi awal pada tahun 1549, Claudius Ptolomeus berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke Timur Jauh. Hingga ia kemudian menyusun peta yang disebut India Barat dan India Timur. Akan tetapi, Claudius belum berhasil

---

<sup>1</sup>Yuni Ikawati dan Dwi Ratih Setiawan, *Survei dan Pemetaan Nusantara* (Cet I; Jakarta: Mapiptek, 2009), h. 6.

menemukan tempat-tempat yang aman dari serangan Portugis. Seorang Belanda lain bernama Linscoten itu kemudian berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

Pada bulan April tahun 1595, empat armada kapal Belanda di bawah komando Corniles De Houtman berlayar menuju kepulauan Melayu, dan tiba di Jawa Barat (pelabuhan Banten) pada bulan Juni 1596. Ekspedisi inilah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (*Verenigde OostIndische Compagnie*)<sup>3</sup> dan bermulanya kegiatan survei dan pemetaan wilayah Nusantara secara lebih intensif oleh Belanda.<sup>4</sup> Adapun tujuan mereka datang ke Indonesia ialah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mencari rempah-rempah yang kemudian akan dijual di negara mereka. Keberhasilan orang Belanda di bawah perintah De Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk mengembangkan dagangannya di Indonesia, maka pada tahun 1598 angkatan kedua di bawah pimpinan Van Nede Van Haskerck dan Van Warwisk datang ke Indonesia.<sup>5</sup>

Kedatangan Belanda yang bertepatan dengan pertahanan maritim dari kesultanan-kesultanan Indonesia yang melemah, yang diakibatkan oleh peperangan yang dilakukan oleh kesultanan Indonesia dalam usahanya menutup lautan Indonesia dari perluasan wilayah imperialis Portugis, menjadikan Belanda lebih mudah menguasai perdagangan di Indonesia, sehingga pada tahun 1599 armada Belanda kembali datang ke Indonesia di bawah pimpinan van der Hagen dan pada tahun 1600 di bawah pimpinan van Neck.<sup>6</sup> Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda masih terbelakang, karena sistem kolonialisme yang diterapkan bagi Bangsa Indonesia terlalu ketat, dominasi dalam bidang politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan kristenisasi penduduk maka Bangsa Indonesia terkhusus Umat Islam mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, material maupun spiritual.

Dalam lingkungan desa, kehidupan rakyat terutama masih pada tingkat substansi serta ekonominya belum terbuka penuh, hubungan masyarakat masih bersifat komunal, solidaritasnya terutama berdasarkan perasaan bersifat emosional. Diferensiasi dan spesialisasi masih rendah, warga desa secara umum adalah petani, maka dalam homogenitas seperti itu berkembang sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, suatu sistem tolong menolong, atau apa yang lazim secara umum disebut gotong royong.<sup>7</sup> Berdasarkan ikatan tersebut untuk melakukan banyak kegiatan tidak memerlukan uang sebagai upah atas pekerjaan, tenaga dapat dikerahkan menurut prinsip pertukaran. Dengan demikian tenaga sebagai modal belum lepas dari keterikatan tradisi di desa. Sejak zaman kuno telah ada hubungan antara desa dengan lingkungan di atas desa, yaitu secara teritorial negara dan secara sosial para pengusaha termasuk

<sup>2</sup>Yuni Ikawati dan Dwi Ratih Setiawan, *Survei dan Pemetaan Nusantara*, h. 6-7.

<sup>3</sup>VOC (*Verenigde Oost Indische Companie*) adalah perkumpulan perdagangan Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1979. Perkumpulan ini berusaha mencari laba sebanyak-banyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spanyol.

<sup>4</sup>Yuni Ikawati dan Dwi Ratih Setiawan, *Survei dan Pemetaan Nusantara*, h. 7.

<sup>5</sup>Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jld. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 237.

<sup>6</sup>Abuddin Nata, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 234.

<sup>7</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium* (Jakarta: Gramedia Utama, 1999), h. 294.

golongan bangsawan. Sudah menjadi gejala umum bahwa dalam masyarakat agraris penguasaan dan pemilikan tanah merupakan dasar bagi struktur sosial dan struktur kekuasaannya. Hubungan tuan tanah dan penggarap tanah menimbulkan saling ketergantungan dan keterikatan.

Sistem feodal dengan sistem produksi prekapitalis menjamin bahwa pertukaran antara tuan dan pengikut atau *abdi* akan menimbulkan aliran hasil bumi, barang dan jasa kepada tuannya. Dalam struktur sosial feodalistis, raja, keluarga dan para bangsawan lainnya para elite birokrasi serta pengusaha daerah kesemuanya berkedudukan sebagai tuan, sedangkan rakyat golongan bawah sebagai *abdi*.<sup>8</sup> Melalui jalur feodal ini para bangsawan mempergunakan ikatan desa dan tradisional untuk mengerahkan rakyat agar mereka memberikan jasa besar kepada tuannya. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa aliran jasa besar dan hasil bumi ke atas jauh lebih besar daripada aliran jasa dari atas ke bawah. Dapat dibayangkan bahwa sistem ini memberi beban yang sangat berat bagi rakyat kecil.

Belanda sangat aktif dalam pendirian sekolah-sekolah baru bagi bangsa Indonesia. Pendidikan Belanda atas Bangsa Indonesia bermula sejak awal abad ke-19 ketika kalangan aristokrat Indonesia belajar di rumah-rumah pemukim Belanda. Sekolah Belanda pertama untuk melatih warga Indonesia untuk beberapa pekerjaan pamong praja didirikan tahun 1848.<sup>9</sup> Pada tahun 1900 prestise kekuasaan dan kepercayaan diri kaum elite bangsawan Jawa mencapai titik yang rendah. Banyak generasi muda yang meninggalkan jabatan dalam pemerintahan dan mencari karir di bidang hukum ataupun kedokteran. Para bangsawan yang lain menciptakan gerakan-gerakan intelektual yang ternyata bersifat anti Islam dan yang berkaitan erat dengan teosofi.<sup>10</sup>

Gerakan-gerakan semacam itu menghubungkan-hubungkan keadaan buruk di Jawa dengan penyebaran agama Islam dan berusaha mengembalikan kebudayaan Jawa dengan cara menyatukan budaya asli dengan pemikiran Barat (Belanda). Pada saat itu juga, kalangan-kalangan Islam juga mulai menyimpulkan tentang pengembalian semangat yang perlu dalam pemurnian Islam.

Pada awal abad ke-19, Jawa merupakan daerah agraris. Sebagian besar dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian dilakukan secara tradisional, teknologi yang dipergunakan juga bersifat sederhana sekali. Sebagian rakyat juga masih hidup dalam kekurangan dan keterbelakangan ekonomi. Dalam menghadapi kehidupan rakyat yang serba terbelakang menurut kaum liberal, semua itu disebabkan oleh sistem feodal yang mematikan hasrat rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut gubernur Hindia Belanda saat itu Dirk Van Hogendorp (1799-1808) mengusulkan agar kedudukan bupati dan penguasa daerah diatur kembali, pemilikan atau penguasaan tanah sebagai sumber pemerasan dicabut dan tanah dikembalikan kepada rakyat.<sup>11</sup> Rakyat diberi tanah untuk ditanami secara bebas, bebas memilih jenis tanaman dan bebas melakukan pekerjaan. Rakyat harus menyetor sebagian hasil bumi mereka untuk memberikan pajak kepada pemerintah kolonial. Akan tetapi dalam struktur feodal

---

<sup>8</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, h. 295.

<sup>9</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 317.

<sup>10</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), h. 196.

<sup>11</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, h. 290.

itu kedudukan bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama mereka. Kepemimpinannya berakar kuat dalam masyarakat sehingga tidak mudah untuk menggeser kedudukannya.

Pada tahun 1825 Belanda mendirikan *Nederlandsche Handel Maatschappij* (N.H.M) yaitu sebuah perusahaan monopoli yang mengorganisir perdagangan antara Hindia Timur dan Belanda. Pada tahun 1867, tanah dari para Bupati dirampas dan tahun 1882 mereka dipecat dari pekerjaan dan tugas-tugas personalnya yang sebagian diserahkan kepada kaum petani. Sejumlah wilayah kabupaten dicabut dari penguasa yang independen digantikan pejabat-pejabat lokal yang digaji.<sup>12</sup>Perekonomian diorganisir berdasarkan sistem kultur/tanam paksa. Menurut sistem tanam paksa pungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor. Petani wajib menyerahkan 1/5 dari tanah mereka kepada pemerintah untuk tanaman tertentu, seperti tebu, nila, kopi, teh, tembakau, kayumanis dan kapas. Mereka menyerahkan produksi pertanian sebagai upeti ataupun pajak.<sup>13</sup>Petani juga diwajibkan menyumbangkan pekerjaannya untuk membangun saluran irigasi, jalan, dan jembatan, membersihkan tanah kosong, bahkan untuk membangun infrastruktur perekonomian pada sebuah pulau. Meskipun sistem ini melindungi petani dari kewajiban tertentu, namun kenyataannya mereka justru menjadi sasaran penghisap lainnya. Barang-barang yang dihasilkan oleh sistem kultur ini dijual kepada N.M.H dengan harga kontrak dan dibawa ke Eropa dengan menggunakan armada Belanda.<sup>14</sup>

Sementara itu sistem tanam paksa berjalan terus tanpa diketahui oleh pemerintah pusat bagaimana pelaksanaannya dan seperti apa dampaknya terhadap petani. Pada tahun 1843 penguasa di Batavia mendengar berita tentang kelaparan di Cirebon. Produksi untuk ekspor harus memenuhi target maka baik tanah maupun tenaga dikerahkan terlebih dulu untuk tanam paksa sampai-sampai produksi pangan sendiri terbengkalai. Kelaparan antara tahun 1843 dan 1848 menyebabkan jumlah penduduk menurun dengan cepat, dari 336.000 jiwa menjadi 120.000 jiwa.<sup>15</sup>

Pengerahan tenaga untuk mengerjakan tanam paksa tidak jarang melampaui batas-batasnya. Rakyat disuruh pergi jauh dari desanya untuk mengerjakan penanaman indigo/kapas dan kopi selama berbulan-bulan di daerah yang baru dibuka. Penanaman tebu juga membawa beban yang sangat berat bagi rakyat, karena menuntut pengolahan tanah yang intensif, pengairan, pemeliharaan sampai dengan panen yang banyak memakan waktu dan tenaga.<sup>16</sup>Penyelenggaraannya sukar diatur secara bersamaan dengan penanaman padi karena keduanya memakai tanah yang sama. Sering kali penanaman padi tidak dapat dimulai dengan tepat sebab harus menunggu sampai tebu dapat ditebang. Keadaan ini masih berlangsung sampai memasuki Politik Etis pada permulaan abad ke-20. Pada awal pembentukannya, Belanda mendung-dungkan akan membayar hutang Belanda kepada rakyat Indonesia dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, dalam perkembangannya kehidupan rakyat Indonesia

<sup>12</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 311.

<sup>13</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, h. 306.

<sup>14</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 311.

<sup>15</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, h. 312.

<sup>16</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, h. 313.

tidak semakin baik, bahkan semakin merosot. Ketika penetrasi kolonial secara intensif menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat, melalui pajak yang berat, pengerahan tenaga kerja atau buruh yang berlebihan dan lengkap dengan peraturan yang menindas. Kenyataan tersebut dirasakan oleh rakyat Indonesia bahwa realitas kekuasaan kolonial tidak cocok dengan kenyataan sosial harmoni dan stabilitas yang dicita-citakan masyarakat tradisional.

Selain itu, kondisi keagamaan masyarakat Nusantara tetap berjalan, namun memiliki kendala-kendala tersendiri dalam proses penyebarannya. Sudah sejak lama sebelum lahirnya Islam, arus kolonialisasi sudah mengalir dari India mengalir ke pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Setelah sebagian bangsa India memeluk Islam, maka orang-orang Islam dari India pun turut mengambil bagian dalam lalu lintas dan imigrasi ke Nusantara. Agama Islam sebagaimana telah diterima oleh Bangsa Indonesia, sebelumnya sudah mengalami proses penyesuaian diri dengan agama Hindu.<sup>17</sup>

Kedatangan agama Islam ke Hindia Belanda bukan akibat penaklukan, melainkan bermula dari bawah, yaitu rumah ibadah atau masjid. Masjid di Hindia Belanda berfungsi sebagai pusat penyebaran dakwah agama ke seluruh kehidupan masyarakat dan memberikan bimbingan kepada segala macam pernyataan hidup masyarakat pribumi yang pada hakikatnya tunduk kepada hukum Islam. Di pulau Jawa, kebanyakan perkara maupun sengketa diselesaikan di serambi masjid. Masjid menjadi ruang pengadilan bagi berbagai macam urusan hukum seperti hukum waris, hukum perkawinan dan lain sebagainya.

Penganut Islam terutama di Jawa senantiasa mensejajarkan syariah dan adat sebagai dua tiang tumpuan bagi kehidupan mereka. Ada pula sebagian golongan kecil dari masyarakat pribumi yang jarang mengunjungi masjid. Kebanyakan dari mereka hampir selalu mengabaikan kewajibannya untuk bersembahyang. Adapun mereka yang menjalankan shalat lima waktu juga jarang pergi ke masjid.<sup>18</sup> Walaupun Islam di wilayah Hindia Belanda banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun orang Islam di wilayah ini pada waktu itu memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. Masalah sinkretisme agama Islam, terutama di kalangan suku Jawa, memang banyak disoroti oleh banyak orang.<sup>19</sup> Di Hindia Belanda, Islam juga mengalami perseteruan dengan berbagai peraturan adat. Pertentangan yang sangat mencolok salah satunya adalah mengenai adat di Minangkabau. Antara adat dan Islam tidak terdapat korelasi yang baik. Di satu pihak adat memperbolehkan untuk melakukan sabung ayam, berjudi dan minum-minuman keras, namun di pihak lain Islam sangat menentang kegiatan-kegiatan seperti itu. Di Jawa juga terdapat pertentangan sistem adat dengan Islam, namun tidak menonjol seperti halnya di Minangkabau. Di dalam masyarakat Jawa dikenal dengan penggolongan antara *abangan* dan *putihan*.<sup>20</sup>

## **B. Kedudukan Belanda Era Kolonialisme**

Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan puncak abad imperialisme yang ditandai dengan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk

<sup>17</sup>Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Bahrataraya Karya Aksara, 1973), h.12-13.

<sup>18</sup>Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, h. 25.

<sup>19</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 12.

<sup>20</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* ( Jakarta: LP3ES, 1982), h. 21.

kekaisaran. Pada masa itu kekuasaan Prancis dan Inggris sudah mulai mengancam wilayah Afrika dan Asia. Mereka menguasai daerah tersebut untuk dijadikan sebuah wilayah kekuasaan Eropa. Belanda di Indonesia sudah memulai politik ekspansinya jauh sebelum itu.

Memasuki abad ke-19, VOC dibubarkan dan Indonesia berada di bawah pemerintah Kerajaan Belanda. Meskipun gagal dalam perdagangan, perusahaan dagang Belanda ini berhasil dalam bidang politik. Semua negara kesultanan, kecuali Aceh, telah jatuh dalam pengaruh kolonial Belanda. Berbeda dengan pendahulunya, VOC yang telah menguasai berbagai sumber dan pusat perdagangan telah mendorong pemerintah Belanda untuk menguasai secara politis, menjajah wilayah yang telah dikuasainya secara ekonomis untuk dijadikan sebagai bagian wilayah Belanda, *Pax Neerlandica*. Di Indonesia Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam.<sup>21</sup>

Belanda pada waktu itu belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai Islam, sehingga mula-mula tidak berani mencampuri masalah agama ini secara langsung. Belanda khawatir akan timbul pemberontakan orang-orang Islam fanatik, sementara di lain pihak Belanda yakin bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Pemerintah Belanda belum berani mencampuri masalah Islam dan juga belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Keengganan mencampuri masalah Islam ini tercermin dalam undang-undang Hindia Belanda ayat 119 RR (Regeerings Reglement/Peraturan Pemerintah) yang berisi mengenai kebebasan dalam menganut agama dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>22</sup> Kebijakan untuk tidak mencampuri agama ini nampak tidak konsisten sebab tidak ada peraturan yang jelas mengenai persoalan ini. Dalam masalah haji pemerintah kolonial ikut campur tangan, para haji sering dicurigai dan dianggap fanatik serta sering memberontak terhadap pemerintah Belanda. Aneka perlawanan terhadap pemerintah Belanda seperti Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Aceh (1873-1903) tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama Islam. Perlawanan ini dipelopori oleh para ulama yang telah kembali dari Makkah atau paling tidak dari mereka yang telah mendapat pengaruh dari para haji. Tahun 1859, Gubernur jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.<sup>23</sup>

Situasi ini berkaitan erat dengan sikap curiga dan kekhawatiran pemerintah Belanda yang berlebihan terhadap perhajian di Indonesia. Masalah Islam yang semakin kuat dan mendominasi setiap aspek, merupakan konsekuensi bagi Belanda. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah Belanda mengirimkan konsulnya<sup>24</sup> di Jeddah untuk mengatur dan mengawasi warga jajahannya di tanah suci.<sup>25</sup>

Masyarakat Indonesia pada masa Kolonial Eropa dibedakan dalam beberapa golongan atau garis warna. Garis warna atau perbedaan warna kulit pada tanah jajahan

<sup>21</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam*, h. 9.

<sup>22</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam*, h. 10.

<sup>23</sup>M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h.263.

<sup>24</sup>Konsul ini bertugas untuk mengatur arus perjalanan jemaah haji Indonesia, terutama dengan berkenaan kepentingan pelayaran pengangkut jemaah haji ataupun menjaga wibawa pemerintah Belanda di mata dunia.

<sup>25</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam*, h. 93.

sangat ketat diberlakukan oleh Kolonial Eropa. Pemerintah Kolonial Belanda membagi golongan sosial di Indonesia berdasarkan kepada hukum dan keturunan atau status sosial.

1. Pembagian masyarakat menurut hukum Belanda, terdiri atas:<sup>26</sup>
  - a. Golongan Eropa
  - b. Golongan Indo
  - c. Golongan Timur Asing;
  - d. Golongan Bumiputera.
2. Pembagian masyarakat menurut keturunan atau status sosial, terdiri atas:<sup>27</sup>
  - a. Golongan bangsawan (aristokrat);
  - b. Pemimpin adat;
  - c. Pemimpin agama
  - d. Rakyat biasa

Berdasarkan golongan sosial tersebut, orang-orang Eropa dianggap sebagai ras tertinggi, kedua orang-orang Indo (turunan pribumi dan Eropa), ketiga orang-orang keturunan Timur Asing (Cina), dan terakhir orang-orang pribumi (Indonesia). Posisi Indonesia yang berada pada urutan paling bawah masih juga dibedakan. Kedudukan seseorang pribumi tersebut dalam perkembangannya dibedakan pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Pembagian kelas tersebut sebenarnya untuk menunjukkan pada kaum pribumi bahwa bangsa kulit putih kedudukannya jauh lebih tinggi dari kulitberwarna. Golongan bangsawan (aristokrat) merupakan golongan tertinggi dari stratifikasi sosial yang diberlakukan oleh Kolonial Eropa. Aristokrat ialah golongan dari orang ningrat. Adapun orang yang termasuk orang ningrat ini ialah Raja/Sultan dan keturunannya, para pejabat kerajaan, dan pejabat pribumi dalam pemerintahan kolonial.

### **C. Hubungan Umat Islam dan Bangsa Belanda Era Kolonialisme**

Melihat fakta-fakta sejarah, hubungan Umat Islam dan Bangsa Belanda tentu tidak harmonis, meskipun sebagian dari kaum bangsawan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Aneka perlawanan terhadap pemerintah Belanda seperti Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Aceh (1873-1903) sudah dapat membuktikan bahwa kedua bangsa tersebut pernah berselisih. Hal ini terjadi karena Bangsa Belanda datang untuk menjajah dan menguras kekayaan Nusantara. Sejak awal Bangsa Barat datang untuk mencari dan menguasai sumber rempah-rempah Hal ini tentu mengganggu stabilitas bangsa Melayu sebagai pedagang. Apalagi Bangsa Belanda datang untuk memonopoli perdagangan melalui VOC. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh bangsa pribumi.

Selain itu, Belanda terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan, meskipun di sisi lain pemerintah Kolonial Belanda memberikan kebebasan tentang hal keagamaan. Kolonial Belanda menganggap bahwa Umat Islam yang berangkat haji memiliki potensi untuk memberontak sehingga mereka selalu dimata-matai. Akhirnya perang pun terjadi karena Umat Islam fanatik tidak bisa menerima perlakuan Bangsa Belanda. Bahkan ulama pun ikut berperang melawan Belanda. Setelah itu, gerak-gerik ulama pun diperhatikan oleh Bangsa Belanda. Bahkan ulama menganggap bahwa bangsa pribumi

<sup>26</sup>Serba Sejarah, "Penggolongan Masyarakat Indonesia Masa Kolonial. <http://serbasejarah.blogspot.com/2011/12/penggolongan-masyarakat-indonesia-masa.html> (25 Oktober 2014).

<sup>27</sup>Serba Sejarah, "Penggolongan Masyarakat Indonesia Masa Kolonial. (25 Oktober 2014).

yang berlindung di bawah kekuasaan Belanda adalah kafir dan harus disyahadatkan kembali.

Hal tersebut terjadi akibat dari saling kecurigaan antara kaum pribumi dengan Bangsa Belanda sebagai bangsa asing yang menjajah Nusantara dan mempekerjakan bangsa pribumi dengan paksa dan upah yang sedikit. Dengan melihat perlakuan Bangsa Belanda terhadap bangsa pribumi tentu sudah jelas hubungan mereka tidak harmonis. Sejumlah peperangan terjadi karena bangsa pribumi memberontak atas perlakuan yang mereka terima.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka pemakalah dapat menyimpulkan bahwa kondisi Umat Islam ketika Bangsa Belanda sangat memprihatinkan. Dari segi politik, Bangsa Indonesia terkhusus Umat Islam telah dijajah oleh Bangsa Belanda. Raja yang menjadi pelindung rakyat Indonesia telah dikuasai. Bahkan sebagian raja hanya sebagai alat Bangsa Belanda untuk mempekerjakan rakyat Indonesia. Raja hanya simbol belaka, sementara kekuasaan dipegang oleh Bangsa Belanda. Umat Islam selalu dicurigai dan dimata-matai oleh kolonial Belanda. Hal ini menimbulkan gesekan sosial antara ulama dan Belanda yang menimbulkan sejumlah peperangan di wilayah Nusantara. Dari segi ekonomi, Umat Islam dipekerjakan secara paksa dan dengan upah yang minim. Belanda bahkan memonopoli perdagangan di Nusantara dengan mengambil keuntungan yang besar.

Strata sosial Bangsa Belanda tentu di atas dibanding dengan masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi hanya berada pada peringkat keempat. Hal itupun masih dibagi kedalam beberapa bagian seperti kaum bangsawan, ulama, pemuka adat dan rakyat jelata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhanuddin, Jajat. *Ulama dan Kekuasaan :Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Cet I; Jakarta, 2012.
- Hurgronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan. Jakarta: Bahratar Karya Aksara, 1973.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Utama, 1999.
- M. Lapidus, Ira. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta : Rajawali Press, 2007.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Utama, 1999.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.